



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Panduan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)



Jakarta, November 2011

Panduan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

KONTRIBUTOR:

Kementerian PP & PA

Bappenas

Kementerian Pekerjaan Umum



Jakarta, November 2011

NARASUMBER

Pakar Gender : 1. Dr. Yusuf Supiandi, MA
2. dr. Yurni Satria, M.Phil

KPP&PA : 1. Dra, Sri Danti, MA
2. Dr. Ir. Hertomo Heroe, MM
3. Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, MM

KONTRIBUTOR

Kementerian PP & PA : 1. Dra. Sunarti, M. Si
2. Zam Zam Muchtarom, SH, MM
3. Ir. Endah Prihatiningtyastuti, M. Si

Bappenas : 1. Dr. Sanjoyo, Msc
2. Fithiriyah, Ph.D

Kementerian Pekerjaan Umum : 1. Ir. Sri Apriantini Soekardi, MM

SEKRETARIAT

KPP&PA : 1. Sri. Lestari, SE
2. Dwi Supriyanto, SH
3. Nani Dwi Wahyuni, CE. M. Is
4. Bayu Harie Nugroho, S. Kom
5. Lita Susilowati, Sos

Desain & Layout

INTERAXI

ISBN 978-979-3247-61-8

Diterbitkan oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
BAB I.	
PENDAHULUAN	1
Latar belakang	1
Dasar Hukum	2
Maksud dan Tujuan	3
Sasaran	4
Ruang lingkup	4
Sistematika Penulisan	5
BAB II.	
GAMBARAN UMUM KONSEP DAN PELAKSANAAN PPRG	7
BAB III.	
KONSEP DAN STRATEGI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	13
Konsep Pemantauan dan Evaluasi PPRG	13
Strategi Pemantauan dan Evaluasi	15
Indikator yang di gunakan sebagai alat ukur Pemantauan dan Evaluasi PPRG	15
BAB IV.	
PROSEDUR DAN MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI	21
Prosedur Pemantauan dan Evaluasi	22
Mekanisme pemantauan dan Evaluasi	24
Pelaporan	25
BAB V.	
PENUTUP	29

LAMPIRAN:

1. FORMULIR ISIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPRG	35
2. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR	63
DAFTAR DIAGRAM	31
DAFTAR ISTILAH	31
DAFTAR PUSTAKA	33

KATA PENGANTAR



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanahkan bagi semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada saat menyusun kebijakan, program, dan kegiatan masing-masing bidang pembangunan, termasuk monitoring dan evaluasinya.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), mulai tahun 2010 telah dilakukan ujicoba Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan PPRG tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Deputy Bidang Pengrusutamaan Gender Bidang Ekonomi menyusun Panduan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPRGdi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Panduan ini bersifat umum dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyamakan persepsi , serta dapat digunakan sebagai rujukan operasional teknis bagi pelaksana pemantauan dan evaluasi, Biro Perencanaan, komponen perencana, Biro Keuangan, dan Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PPRG di masing-masing institusinya sesuai dengan kewenangannya.

Disadari bahwa Panduan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan selanjutnya sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan panduan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, kami ucapkan terimakasih. Harapan kami, semoga panduan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak yang terkait.

Jakarta, November 2011

Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender

Bidang Ekonomi,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Hertomo Heroe', written in a cursive style.

Hertomo Heroe



1. LATAR BELAKANG

Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) mengamanatkan bahwa pengintegrasian gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 104 tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2011 merupakan acuan dalam penerapan PUG pada tahap perencanaan dan penganggaran. Meskipun sudah ada kebijakan yang memerintahkan untuk melaksanakan pembangunan yang Responsif Gender, namun ternyata masih banyak K/L yang belum menjalankan program/kegiatan yang Responsif Gender. Hal ini di sebabkan karena belum adanya komitmen serta pemahaman para pengambil keputusan dan perencana program. Untuk itu diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di K/L.

Pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud dalam PMK tersebut di atas telah diujicobakan pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2010 dan RKA Tahun 2011 di beberapa Kementerian dan Lembaga Non Kementerian. Dengan demikian pelaksanaan PPRG telah berjalan selama dua tahun anggaran. Pada tahun 2010 telah diujicobakan pada tujuh kementerian yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BAPPENAS, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2011 telah dilaksanakan pada Kementerian/Lembaga lingkup Ekonomi, Politik, Sosial, dan Hukum (EKOPOLSOSKUM). Untuk tahun 2012 pelaksanaan PPRG ini direncanakan untuk dilaksanakan pada 27 Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan tahun – tahun selanjutnya akan dilakukan pada semua Kementerian/Lembaga. Untuk itu telah dikeluarkan pula Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.02/2011 tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Non Kementerian.

Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini akan membantu memberikan informasi tentang proses dan tahapan pelaksanaan PPRG, serta mengidentifikasi kendala-kendala serta kegiatan/intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu yang akan datang. Dengan demikian upaya pelaksanaan PPRG di masing-masing Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (K/L) dapat dilakukan secara lebih efektif.

Melalui pemantauan dan evaluasi yang harmonis dan melekat utuh dalam suatu sistem, dalam hal ini adalah pelaksanaan PPRG, akan dapat dilihat kesesuaian proses dengan apa yang direncanakan, kesesuaian dalam pencapaian tujuan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Dengan adanya pedoman ini, hal tersebut dapat dilakukan.

Berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan PPRG yang cakupannya terus meluas, diperlukan satu panduan umum pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan PPRG untuk melihat perkembangan dan menemukenali berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG di masing - masing K/L.

Panduan umum tersebut membantu pihak-pihak terkait dalam memahami pentingnya sistem pemantauan dalam pelaksanaan PPRG, bagaimana kerangka kerja (*framework*) sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif dan bagaimana melaksanakannya.

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- b. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2011;
- h. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

3. Maksud dan tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Maksud dan tujuan dari panduan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PPRG adalah sebagai berikut :

a. Maksud :

Memberikan panduan kepada Kementerian/Lembaga Non Kementerian (K/L) dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PPRG di masing-masing institusinya sesuai dengan kewenangannya.

b. Tujuan :

Pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk mendapatkan umpan balik bagi program atau kegiatan yang sedang berjalan dan atau yang sudah dilaksanakan. Panduan ini bertujuan agar kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan.

Tujuan Umum:

- a. melihat PPRG sebagai instrumen akuntabilitas publik;
- b. mengetahui hambatan dan permasalahan selama proses pelaksanaan PPRG;
- c. melihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PPRG;
- d. melihat ketercapaian *output* dan *outcome* pelaksanaan PPRG yang juga merupakan kinerja K/L dalam program spesifik (program yang memiliki isu gender);
- e. melihat peran aktif K/L dalam pelaksanaan PPRG;
- f. penentuan kebijakan yang akan datang

Tujuan Khusus:

- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, antara lain siapa yang melaksanakan PPRG; apakah GBS (*Gender Budget Statement*) dapat diimplementasikan; siapa SDM (Sumber Daya Manusia) yang menguasai; bagaimana interaksi antar komponen atau pembuat (pemangku kepentingan/*stake holder*), apakah GBS dapat direalisasikan dalam DIPA dll;
- b. memberikan masukan tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan PPRG;
- c. mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan dilaksanakannya PPRG;
- d. memberikan informasi yang diperlukan bagi sistem penilaian (evaluasi) pelaksanaan PPRG.

Sedangkan evaluasi lebih terfokus kepada penilaian *output* dan *outcome* yang secara rinci bertujuan untuk:

- a. Mengetahui apakah PPRG dilaksanakan sesuai standar atau aturan (PMK 104 Tahun 2010 dan PMK yang berlaku pada periode dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi).
- b. Mengetahui apakah pelaksanaan PPRG mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.
- c. Mengidentifikasi hal-hal penting bagi tindak lanjut atau pengembangan kebijakan di masa yang akan datang.

4. SASARAN

Sasaran pemantauan dan evaluasi adalah pelaksana PPRG di K/L berdasarkan PMK 104 tahun 2010 yang diujicobakan pada beberapa kegiatan terpilih, atau PMK No. 93 Tahun 2011, atau berdasarkan PMK yang berlaku pada periodenya. Sasaran pelakunya dan lembaganya adalah pejabat terkait pada Kementerian dan Lembaga Non Kementerian yang telah menerapkan PPRG antara lain :

1. Pelaksana pemantauan dan evaluasi dan pelaporan;
2. Biro Perencanaan;
3. Perencana komponen unit operasional;
4. Biro Keuangan;
5. Inspektorat

5. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG ini mencakup substansi sebagai berikut:

1. Langkah-langkah pelaksanaan pemantauan evaluasi;
2. Konsep dan strategi pemantauan evaluasi, prosedur dan mekanisme pemantauan evaluasi;
3. Indikator pemantauan dan evaluasi;
4. Pelaporan.

BAB II

KONSEP DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER



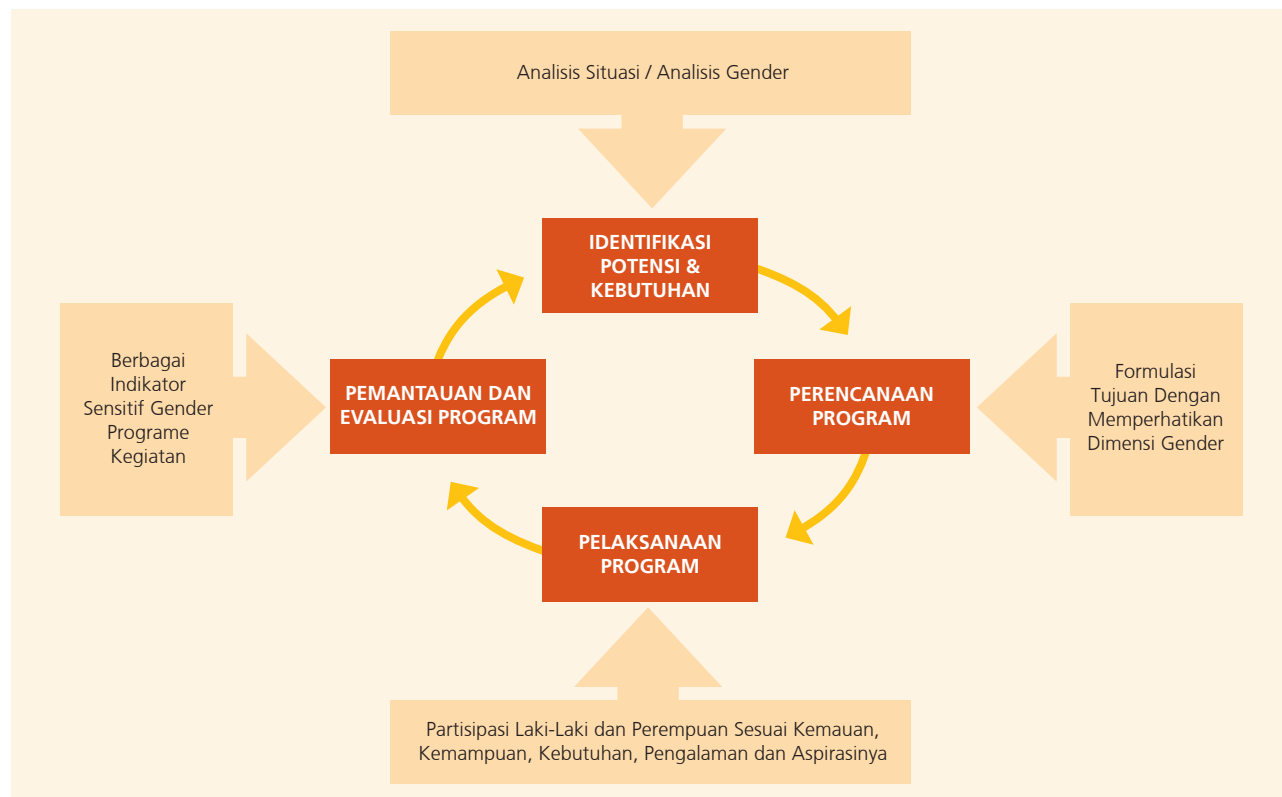
Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan upaya untuk mempercepat penerapan PUG yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan yang selama ini masih ditemukan. Kesenjangan tersebut pada umumnya merupakan akibat dari konstruksi sosial dan budaya.

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender seperti yang dijelaskan dalam buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Generik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dan proyek ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor;
2. Penganggaran responsif gender :
 - a. Dalam proses penganggaran yang responsif gender, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan proyek pembangunan;
 - b. Anggaran responsif gender diarahkan untuk membiayai program, proyek, dan kegiatan pembangunan agar dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan sehingga dapat mengurangi kesenjangan; dan
 - c. Anggaran responsif gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis gender dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.

Pengintegrasian isu gender dimulai dari tahap perencanaan sampai penganggaran dimana proses ini akan menghasilkan anggaran responsif gender. Mekanisme perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dapat digambarkan dalam Diagram 1, yang dimulai dari analisis situasi/ analisis gender untuk mengetahui potensi dan kebutuhan, formulasi tujuan dengan memperhatikan dimensi gender pada tahap perencanaan program, melibatkan laki-laki dan perempuan pada tahap pelaksanaan program dan menentukan serta memanfaatkan indikator yang sensitif gender sebagai alat ukur pada tahap pemantauan dan evaluasi.

Diagram 1. Mekanisme Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan yang Responsif Gender



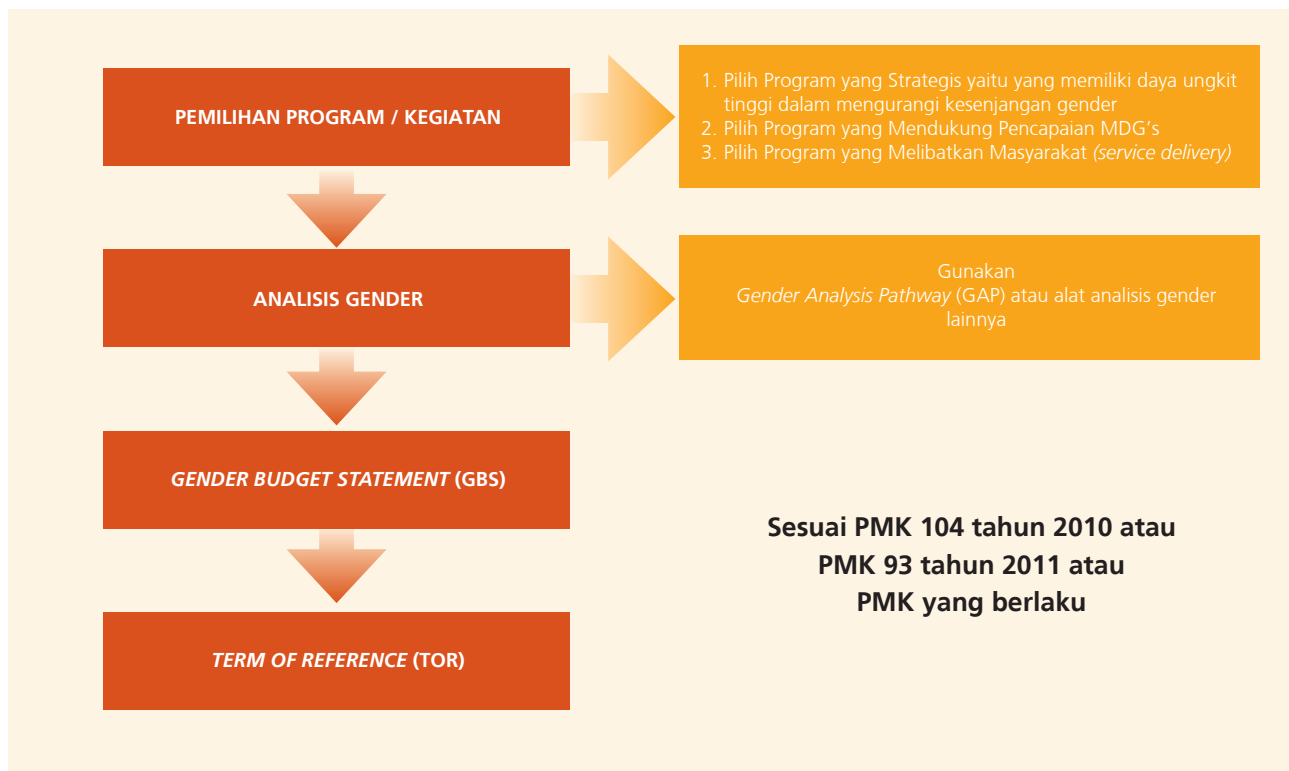
Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi atas 3 kategori, yaitu:

- a. **Anggaran khusus target gender/anggaran spesifik gender**, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki yang didasarkan pada hasil analisis gender;

- b. **Anggaran kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk mengatasi masalah kesenjangan gender yang diketahui dari analisis gender, yaitu adanya kesenjangan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;
- c. **Anggaran pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)**, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Proses perencanaan dan penganggaran responsife gender dalam penyusunan RKA-K/L, dilakukan melalui langkah-langkah seperti terlihat pada Diagram 2 dibawah ini.

Diagram 2. Langkah-langkah PPRG dalam Penyusunan RKA-K/L



LANGKAH 1: PEMILIHAN PROGRAM

Program yang dipilih dari dokumen perencanaan untuk disusun ARGnya adalah program yang strategis dan memiliki dimensi luas atau daya ungkit tinggi baik dalam hal dampak dan pelibatan masyarakat serta mendukung pencapaian MDG's (*Millenium Development Goal's*). Program tersebut bukanlah program yang baru akan tetapi program yang sudah tercantum dalam RPJMN, Renstra, Renja atau RKA yang sudah ada pagu anggarannya. Berdasarkan PMK No 104 tahun 2010 dan PMK 93 tahun 2011, yang akan disusun ARG nya adalah pada *level output* dari program-program terpilih tersebut dengan kriteria:

- Merupakan penugasan prioritas pembangunan nasional.
- Kegiatan tersebut merupakan pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*).
- Kegiatan tersebut memperkuat pelembagaan PUG termasuk *capacity building*, advokasi gender dan KIE, kajian dan pengumpulan data terpilah.

LANGKAH 2: MELAKUKAN ANALISIS GENDER

Analisis gender dilakukan dengan menggunakan alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway* (GAP) atau alat analisis gender lainnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan gender serta faktor penyebabnya, sehingga dapat dirumuskan alternatif solusinya secara tepat.

LANGKAH 3: MENYUSUN *GENDER BUDGET STATEMENT* (GBS)

Hasil analisis gender yang dilakukan pada langkah 2 kemudian dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) atau pernyataan anggaran gender. GBS adalah dokumen yang memperlihatkan suatu *output* (keluaran) kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

LANGKAH 4: PENYUSUNAN *TERM OF REFERENCE* (TOR) ATAU KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK).

Secara garis besar, TOR menggambarkan relevansi masing-masing komponen *input* (masukan) sebagai tahapan dalam rangka pencapaian *output* (keluaran) dan kontribusinya dalam mencapai hasil atau dampak. Di dalam TOR dijelaskan latar belakang mengapa kegiatan tersebut diusulkan, siapa penerima manfaat dari kegiatan tersebut, strategi yang digunakan dalam mencapai *output*

(keluaran) kegiatan, waktu yang dibutuhkan dan perkiraan biaya yang dibutuhkan. TOR yang dibuat haruslah responsif gender yang dapat dilihat dari latar belakang, strategi, serta siapa sasaran dan penerima manfaat dari kegiatan tersebut. Sumber informasi dalam penyusunan TOR adalah hasil analisis gender dan TOR tersebut harus sinkron dan konsisten dengan GBS.

Pada PMK 93 Tahun 2011, langkah ke-4 ini, yaitu penyusunan TOR (KAK) tidak diperlukan, cukup sampai penyusunan GBS. Namun untuk lebih menjelaskan latar belakang mengapa kegiatan tersebut diusulkan dan sebagai alat kontrol dan masukan bagi pimpinan dan bagi Tim Verifikasi ARG, TOR nampaknya masih dibutuhkan.

BAB III

KONSEP DAN STRATEGI PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI



1. KONSEP PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PPRG

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan, bahwa proses pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Pemerintah. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi merupakan hal yang wajib bagi seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemantauan dan evaluasi adalah merupakan suatu komponen utama dalam proses manajemen untuk memantau, mengendalikan, menilai dan melaporkan seluruh pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien (KPP UNDP, 2007). Sub sistem ini tidak berdiri sendiri akan tetapi menyatu secara utuh dengan sub sistem lainnya untuk mengamankan sistem yang lebih besar dimana setiap komponen dalam sistem tersebut memiliki satu keterpaduan dan saling memberi pengaruh dalam menentukan kualitas pelaksanaan suatu program.

Casley dan Lury (1981), mengatakan bahwa pemantauan (dalam panduan ini disebut pemantauan) merupakan suatu bagian integral dari siklus manajemen dimana di dalamnya dilakukan pengecekan dan pencatatan kondisi dan situasi proyek serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga secara dini dapat diketahui apakah kegiatan telah dilaksanakan; *input* (masukan) telah disalurkan sesuai jumlah, kualitas dan waktu penyalurannya, serta digunakan sebagaimana mestinya; *output* (*keluaran*) telah tercapai; dan tindakan-tindakan yang diperlukan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Pemantauan dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan

rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Mengacu pada pengertian pemantauan di atas, pemantauan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan PPRG. Prinsip-prinsip pelaksanaan pemantauan antara lain adalah; dilakukan secara terus menerus, menjadi umpan balik terhadap perbaikan program/ kegiatan, berguna bagi organisasi, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku serta berorientasi kepada tujuan program.

Evaluasi pelaksanaan PPRG di bidang pembangunan dilakukan dengan menilai sasaran sumberdaya (*input*) yang digunakan, sasaran proses pelaksanaan, sasaran kinerja keluaran (*output*) dari kegiatan serta hasil (*outcome*) dari PPRG tersebut. Hasil evaluasi digunakan oleh para pengambil kebijakan di setiap K/L untuk menilai apakah pelaksanaan PPRG memberikan hasil (*outcome*) positif terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender di sektor tersebut, serta dapat pula memberi gambaran tentang kinerja K/L, khususnya dalam program yang memiliki daya ungkit tinggi. Prinsip dari evaluasi adalah : terencana, relevan, objektif, dapat dibuktikan dan terukur, bersifat kesinambungan, spesifik dan layak serta menyeluruh.

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG para pelaksana harus sudah memahami isu gender dan secara tepat menemukan adanya kesenjangan gender, serta dapat memperlihatkan bahwa capaian perencanaan dan penganggaran program dapat meningkatkan kesetaraan gender.

2. PELAPORAN PELAKSANAAN PPRG

Agar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG pada Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (K/L) efisien dan efektif digunakan strategi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi itu sendiri dilaksanakan oleh masing-masing K/L, baik yang berfungsi sebagai penggerak (*driver*) maupun sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*) secara mandiri, namun dilakukan melalui koordinasi internal antar komponen (*internal coordinative and self monitoring and evaluation*).

- b. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan observasi dan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan (*direct observation*) dengan pendekatan sistem (*systemic approach*) dan berorientasi pada tujuan (*output based orientation*).
- c. Berorientasi kepada perubahan (*changing based orientation*) artinya kegiatan pemantauan berusaha melihat setiap perubahan yang terjadi pada setiap proses dengan mencatat dan mengamati setiap indikator (*input*, proses, *output* dan *outcome*) pada tahapan pelaksanaan PPRG.
- d. Pelaporan dilaksanakan pada masing-masing K/L secara berjenjang, sedangkan laporan keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PPRG masing-masing K/L dilakukan setiap tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

3. INDIKATOR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT UKUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPRG

Indikator yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini merupakan indikator kinerja (ukuran besaran) dari setiap tahap pelaksanaan PPRG yang menggambarkan indikator *input*, proses, *output* dan *outcome* (hasil). Untuk lebih memudahkan dan memfokuskan proses pemantauan, pelaksanaan PPRG dibagi ke dalam tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan tahap melihat hasil dari PPRG tersebut.

Seperti dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa pada dasarnya pelaksanaan PPRG merupakan implementasi dari strategi PUG pada tahap perencanaan dan penganggaran. Karena itu prasyarat dilaksanakannya PUG merupakan *input* atau sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan PPRG yang harus ada pada tahap persiapan.

a. Pemantauan pelaksanaan PPRG.

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran)	INDIKATOR KINERJA	Instrumen
		<i>(INPUT)</i> Prasyarat PUG		Formulir isian
1	TAHAP PERSIAPAN	1. Komitmen	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri terkait 	
		2. Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Renstra K/L yang mengandung isu gender Renja Tahunan yang mengandung isu gender Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG di K/L Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG K/L (di tingkat Satker) Kebijakan tentang data terpilah 	
		3. Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> POKJA PUG di K/L <i>Focal Point</i> Rencana kerja POKJA PUG Laporan kerja POKJA PUG 	
		4. Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> Tim (SDM) terlatih (paham PUG dan PPRG) atau fasilitator (K/L) SDM perencana Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG (sesuai PMK 104/2010 atau PMK yang berlaku) 	
		Sumber dana	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran untuk pelembagaan PUG 	
		5. Data terpilah	<ul style="list-style-type: none"> Data terpilah tentang program terkait 	
		6. Alat analisis gender	<ul style="list-style-type: none"> Metoda analisis gender yang di gunakan 	
		7. Peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Forum pertemuan dengan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG Anggota POKJA PUG dari masyarakat 	

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran)	INDIKATOR KINERJA	Instrumen
(Proses)				
2	TAHAP PERENCANAAN	1. Renstra yang terkait dengan isu gender	<ul style="list-style-type: none"> Program yang mengandung isu gender berdasarkan Renstra K/L 	
		2. Kegiatan dalam RKA K/L yang mengandung isu gender	<ul style="list-style-type: none"> <i>Output</i> terpilih (yang ada isunya) Jumlah <i>output</i> yang di targetkan penyusunan ARGnya untuk tahun berjalan 	
		3. Data terpilih yang terkait <i>output</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan data terpilih terkait dengan <i>output</i> yang akan disusun ARGnya 	
		4. Proses analisis GAP atau sejenis	<ul style="list-style-type: none"> Hasil analisis gender 	
(Output)				
3	TAHAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN PPRG	1. GBS	<ul style="list-style-type: none"> GBS dari <i>output</i>, <i>suboutput</i>, komponen, sub komponen yang ada isu GBS di dasarkan kepada hasil analisis 	
		2. TOR (KAK)	<ul style="list-style-type: none"> KAK untuk setiap <i>output</i> kegiatan Penyusunan GBS dan KAK mengacu kepada format PMK 104/2010 (PMK yang berlaku) 	
(Outcome)				
4	HASIL PPRG	1. Satker yang menyusun PPRG	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Satker yang menyusun PPRG 	
		2. Penelaahan GBS dan KAK (DJA/Kemkeu)	<ul style="list-style-type: none"> Tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA atau Tim yang mendapat otorisasi 	
		3. Anggaran dalam DIPA	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran <i>output</i>, <i>sub output</i>, komponen dan sub komponen yang tersedia (disetujui) dalam DIPA sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK 	
		4. Realisasi anggaran dan realisasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentasi realisasi anggaran responsif gender yang ada dalam DIPA. Persentasi realisasi kegiatan yang responsif gender (yang ada dalam DIPA) sesuai GBS dan KAK 	

b. Evaluasi pada aspek-aspek pelaksanaan PPRG

NO	Aspek	Indikator	Metode
1	<p><u>Input</u> Sejauh mana SDM K/L mengetahui dan memahami Prasyarat PUG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi <i>input</i> yang tersedia. 2. Cakupan unit Eselon II yang sudah tersosialisasi dengan Kepmen (bila ada) 3. Proporsi SDM terkait yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG. 4. Masalah dan kendala yang dihadapi terkait <i>input</i>? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di analisis dari hasil pemantauan. 2. <i>Interview</i> dengan POKJA atau <i>Focal point</i> 3. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan dan Perencana komponen (penyusun PPRG)
2	<p><u>Proses</u> Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi <i>output</i> yang ada isu gendernya dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada di RKAKL. 2. Proporsi <i>output</i>, <i>sub output</i>,komponen yang dibuat GBSnya dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada isu gendernya. 3. Kelengkapan data terpilah terkait <i>output</i>. 4. Masalah atau kendala selama proses analisis gender 5. Solusi dari masalah dan kendala yang ditemui (bila ada). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelaah RKA KL 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan K/L dan perencana komponen
3.	<p><u>Output</u> Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian isu gender yang ada dalam GBS dengan hasil analisis gender 2. Kesesuaian KAK dengan GBS 3. Proporsi jumlah GBS dan KAK dibandingkan <i>output</i> ada isu gendernya 4. Kesesuaian rencana aksi yang dimuat dalam KAK dengan hasil analisis gender 5. Kendala dan masalah dalam membuat GBS dan KAK 6. Solusi kendala dan masalah (bila ada) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Interview</i> dengan perencana komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen hasil analisis gender, GBS dan KAK

NO	Aspek	Indikator	Metode
4.	<p style="text-align: center;"><u>Outcomes</u></p> <p>Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di K/L</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi jumlah Satker yang melaksanakan PPRG dibandingkan Satker yang ada di K/L 2. Proporsi jumlah dana yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang di usulkan dalam GBS dan KAK di masing-masing Satker 3. Proporsi anggaran <i>output/sub output</i> yang dibuat GBS nya dibandingkan total anggaran Satker 4. Proporsi anggaran <i>output/sub output</i> yang ada GBSnya dibandingkan dengan total anggaran <i>Output</i> yang ada isu gendernya 5. Proporsi Anggaran <i>output/sub output</i> yang ada GBS di seluruh K/L dibandingkan total anggaran K/L 6. Proporsi realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) sesuai format KAK. 7. Proporsi realisasi kegiatan yang responsif gender (yang ada GBS) dibandingkan dengan yang bukan responsif gender. 8. Proporsi pencapaian target indikator yang tercantum dalam GBS. 	<p>Membandingkan dokumen GBS dan KAK dengan DIPA dan rencana kerja</p>

Catatan: KAK tidak digunakan sebagai indikator dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG berdasarkan PMK 93 tahun 2011, karena menurut PMK tersebut KAK tidak perlu di buat, namun KAK diharapkan tetap di buat untuk melihat apakah *output/sub output* kegiatan benar-benar responsif gender serta bagaimana strategi pelaksanaannya.

BAB IV

PROSEDUR DAN MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Sebelum melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal yaitu: (a). kejelasan tentang apa yang akan dipantau dan dievaluasi, (b) data apa yang akan dikumpulkan serta, (c), kemampuan tenaga pelaksana pemantauan dan evaluasi.

Aspek atau sasaran yang akan dipantau dalam pelaksanaan PPRG dilihat dari aspek, *input*, proses, *output* dan *outcome* yang diamati pada setiap tahapan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan hasil. Data yang akan dikumpulkan adalah tentang indikator-indikator yang sesuai dengan tahap-tahap tersebut, antara lain: indikator *input* yang tersedia pada tahap persiapan, indikator proses pada tahap perencanaan, indikator *output* pada tahap pelaksanaan PPRG dan indikator *outcome* pada tahap pencapaian hasil. Tenaga pelaksana pemantauan dan evaluasi adalah tenaga pada unit yang ditunjuk sesuai struktur K/L = Kementerian/Lembaga Non Kementerian atau yang sesuai dengan tupoksinya.

Pelaksana tersebut hendaknya memenuhi syarat-syarat sbb:

- a. Memahami konsep PUG dan aplikasi PPRG;
- b. Terampil membuat alat pemantauan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pokok (*guide questions*) dan daftar pertanyaan penting;
- c. Terampil melakukan pengumpulan data, termasuk data terpilah;
- d. Terampil dalam memilih kerangka penilaian atau evaluasi yang tepat dan mampu melakukan analisis (deskriptif);
- e. Terampil dalam membuat laporan, sehingga dapat memenuhi permintaan pemakai atau pengguna hasil pemantauan, yaitu komponen terkait pada K/L yang bersangkutan, Bappenas (Deputi SDM), Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sesmen, Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi dan Bidang Polsoskum).

1. PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

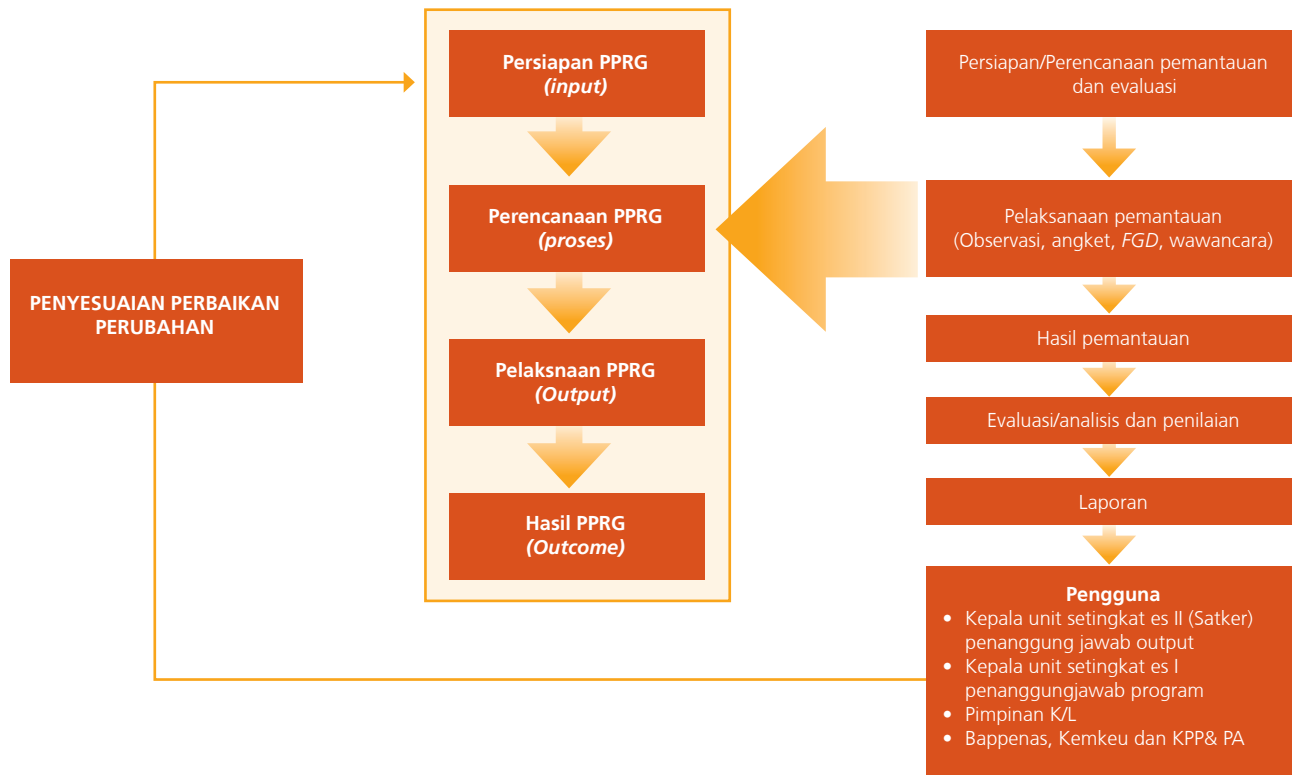
Proses dasar dari pemantauan secara umum meliputi tiga tahap yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan yang disiapkan pada tahap persiapan; (2) pengukuran; (3) menentukan kesenjangan (*deviasi*) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Menurut Dunn (1981), pemantauan sekurang-kurangnya mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. **Ketaatan (*compliance*).** Pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks PPRG, pertanyaannya adalah apakah pelaksana yang menyusun PPRG di lembaganya sudah melaksanakan PPRG sesuai ketentuan atau standar yang berlaku;
- b. **Pemeriksaan (*auditing*).** Pemantauan juga berfungsi untuk mengetahui apakah sumberdaya dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak *user* (target) telah mencapai mereka. Dalam konteks pelaksanaan PPRG, pertanyaannya difokuskan kepada: apakah penyusunan PPRG sudah menghasilkan ARG dan memberi dampak positif terhadap kesenjangan gender;
- c. **Laporan (*accounting*).** Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial di masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan sesudah periode tertentu. Dalam kaitannya dengan PPRG, pertanyaannya adalah, apakah laporan pemantauan sudah memuat informasi tentang adanya perubahan pemahaman atau keterampilan para SDM terkait dengan penyusunan PPRG;

- d. **Penjelasan (explanation).** Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan perubahan yang terjadi, apa akibat adanya perubahan tersebut dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Dalam kaitannya dengan PPRG, pemantauan akan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan apa akibat dari penyimpangan atau adanya perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan PPRG tersebut.

Hasil pemantauan akan menjadi masukan pada tahap evaluasi. Evaluasi merupakan proses yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Selain itu, evaluasi berfungsi mengukur kemajuan dan merupakan alat perbaikan dan alat untuk memberikan rekomendasi bagi perencanaan pada siklus berikutnya. Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir yaitu, pelaporan (lihat Diagram3).

Diagram 3. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi



Tahap persiapan digunakan untuk menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi antara lain menetapkan pelaksana, menyiapkan instrumennya, mengkoordinasikan dengan komponen-komponen internal terkait dan menyiapkan jadwal pelaksanaannya, serta menentukan metode yang akan digunakan. **Tahap pelaksanaan**: implementasi kegiatan sesuai dengan metode dan mekanisme yang sudah ditentukan, yaitu observasi langsung dari dokumen-dokumen terkait, angket, FGD (*focus group discussion*) atau diskusi kelompok terarah, dan wawancara dengan pejabat terkait. **Tahap akhir** digunakan untuk menyusun hasil pemantauan dan melakukan evaluasi atau penilaian dari data dan informasi hasil pemantauan tersebut, serta menyusun laporan. Selanjutnya pelaksana mengirimkan laporan kepada pengguna secara berjenjang, yaitu pimpinan unit terkait di internal K/L sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*) dan kepada institusi eksternal K/L, yaitu K/L yang berfungsi sebagai penggerak (*driver/mover*) dalam hal ini adalah Bappenas, KPP-PA dan Kementerian Keuangan. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi bagi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPRG serta pengembangan dan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

2. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Mekanisme pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan waktu pelaksanaan, pelaksanaannya, metoda, instrumen, dan dokumen yang digunakan serta langkah-langkah pelaksanaan.

- a. Waktu pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala setiap enam bulan (Januari dan Juli). Namun pemantauan dapat pula dilakukan selama proses pelaksanaan PPRG secara langsung oleh tim pelaksanaannya.
- b. Menentukan tim pelaksana pemantauan dan evaluasi. Tim pelaksana adalah SDM dari unit terkait seperti di Biro Perencanaan untuk tingkat K/L atau unit kerja terkait yang sesuai struktur K/L, komponen perencana tingkat Eselon I dan Eselon II atau tenaga yang ditunjuk oleh pimpinan unit.

Tim pemantauan dan evaluasi:

- Menetapkan target sasaran pemantauan dan evaluasi, yaitu pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PPRG (Biro Perencanaan K/L, perencana komponen di unit-unit operasional, Biro Keuangan atau pelaksana yang ditunjuk oleh penentu kebijakan).
 - Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan termasuk formulir isian.
- c. Metoda yang digunakan dapat berupa observasi langsung, angket, pengisian formulir dan wawancara kepada pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PPRG dan atau melalui FGD (*focus Group Discussion*).

- d. Instrumen yang digunakan adalah formulir pemantauan dan evaluasi yang disediakan untuk setiap tingkatan (tingkat K/L, tingkat Eselon I (program) dan tingkat Satker (lihat lampiran).
- e. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi.

Alur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilihat pada Diagram 4

Diagram 4. Alur Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi



3. PELAPORAN

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disusun secara ringkas dan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pengantar

Bagian ini memuat pengantar penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan pemantauan;

b. Ringkasan eksekutif

Bagian ini memuat rangkuman kegiatan dan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan;

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan, yang mencakup antara lain: tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, metode yang digunakan, jadwal pelaksanaan, dan masalah yang ditemukan selama proses pemantauan dan evaluasi;

d. Lingkup kegiatan

Menjelaskan lingkup kegiatan pemantauan yang telah diselenggarakan, termasuk siapa sasarannya (unit-unit mana saja di lingkungan K/L);

e. Hasil evaluasi (análisis dan penilaian)

Menggambarkan hasil kajian atau análisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang sudah dilakukan. Hasil evaluasi yang dilaporkan mencakup aspek-aspek berikut:

- Pencapaian indikator kinerja setiap tahapan pelaksanaan PPRG.
- Proses pelaksanaan atau aktivitas penyusunan PPRG (termasuk kendala dan masalah yang muncul selama pelaksanaan)
- Penyimpangan yang terjadi dibandingkan dengan aturan yang berlaku serta penyebab penyimpangan.
- Kesimpulan penilaian

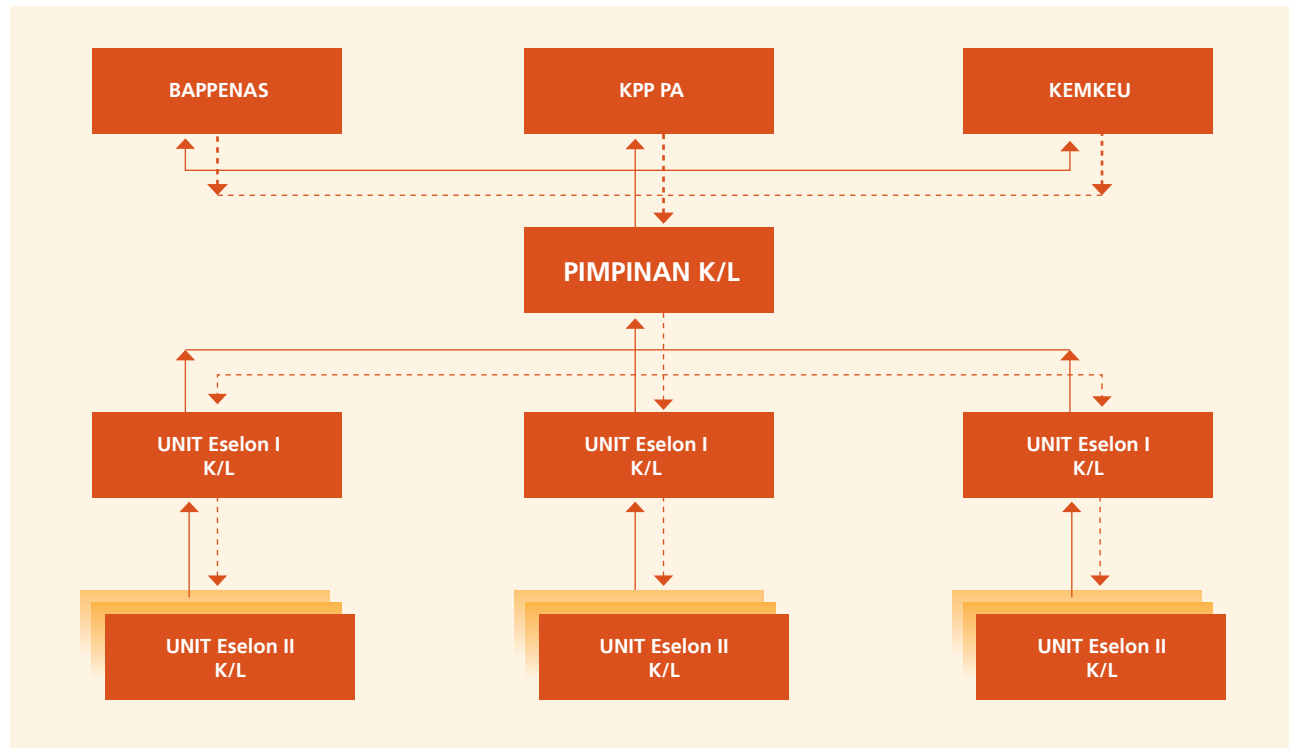
f. Rekomendasi

Rekomendasi memuat hal-hal yang perlu mendapat perhatian atau memerlukan tindak lanjut baik oleh pimpinan unit internal pelaksana PPRG maupun instansi eksternal sebagai penggerak (Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

g. Lampiran: daftar isian (formulir) yang digunakan dll.

Laporan dikirimkan secara berjenjang kepada pimpinan unit atau pengguna seperti pada Diagram 5 paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemantauan dan evaluasi dilakukan. Hasil pemantauan dan evaluasi di unit setingkat Eselon II dikirimkan kepada pimpinan unit Eselon I terkait, dan hasil pemantauan dan evaluasi tingkat Eselon I dikirimkan kepada pimpinan K/L. Selanjutnya hasil pemantauan tingkat K/L dikirimkan kepada komponen terkait di Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh K/L yang bersangkutan.

Diagram 5. Alur Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi



— alur laporan
- - - alur feed back (umpan balik)

BAB V

PENUTUP



Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan, bahwa pemantauan dan evaluasi merupakan instrumen yang penting dalam melihat keberhasilan kinerja suatu program atau kegiatan, sekaligus juga mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Begitu juga dalam kebijakan PPRG yang menghasilkan anggaran responsif gender sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 104 tahun 2010 dan No 93 tahun 2011, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk melihat kinerja masing-masing Kementerian/Lembaga Non Kementerian (K/L) dalam melaksanakan Peraturan Menteri tersebut.

Sehubungan dengan hal itu kegiatan pemantauan dan evaluasi menjadi instrumen yang penting untuk mengetahui berbagai persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan PPRG di masing-masing K/L. Berbagai data dan informasi dari kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat menjadi masukan yang penting bagi K/L itu sendiri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, begitu pula bagi Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam menentukan kebijakan pelaksanaan PPRG pada masa-masa yang akan datang.

Buku Panduan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan PPRG ini merupakan acuan bagi para pimpinan K/L, POKJA PUG / *Focal point* atau para pelaksana penyusunan PPRG, serta pelaksana pemantauan dan evaluasi dalam melihat kemajuan dari proses pelaksanaan PPRG tersebut, baik K/L tersebut sebagai “*drivers*” ataupun sebagai pelaku operasional. Oleh karena itu, dalam pengisian formulir/instrumen pemantauan dan evaluasi ini diperlukan kejujuran dalam memberikan dan menuliskan informasi-informasi yang aktual dan akurat sebagai prasyarat dalam memperoleh data yang objektif dan benar. Data dan informasi yang benar, akan memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan yang tepat, dan penentuan kebijakan pelaksanaan PPRG dimasa yang akan datang.

Buku ini disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan penyusunan PPRG, dan telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan di K/L yang bersangkutan. Namun demikian buku panduan ini hanya berupa panduan yang bersifat standar atau “generik” yang dapat digunakan secara umum. Karena itu buku ini dapat dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi K/L. Satu hal yang perlu pula dipertimbangkan untuk masa yang akan datang adalah, apakah mungkin memasukkan aspek pemantauan pelaksanaan PPRG ini kedalam sistem pemantauan program pembangunan sesuai dengan PP 39 tahun 2006.

DAFTAR ISTILAH

1	Anggaran Responsif Gender (ARG)	Anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberi manfaat kepada perempuan & laki-laki. ARG merupakan hasil dari PPRG
2	Anilisis Gender	Analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, kontrol terhadap sumber-sumber daya perempuan; akses, kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan; partisipasi dalam proses pembangunan; dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya, seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
3	Bias Gender	Pandangan atau visi yang menyimpang tentang gender/berpihak kepada jenis kelamin tertentu.
4	Dampak	Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan/kepentingan umum
5	Evaluasi	adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (<i>input</i>), keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) terhadap rencana dan standar (PP39/2006).
6	Gender	Hubungan antara perempuan dan laki-laki yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat mengenai tugas, peran, tanggung jawab, sikap dan sifat bagi perempuan dan laki-laki yang dapat berubah dari waktu ke waktu.
7	Gender Analysis Pathways (GAP)	Satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya untuk menyusun kebijakan yang responsif gender.
8	Input	Segala sesuatu yg dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan & program dapat berjalan, contoh : SDM, dana, perlengkapan, waktu, dsb.
9	Isu gender	Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi obyektif).
10	Keadilan gender	Suatu keadaan dan perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara.
11	Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau Term of Reference (TOR)	Kerangka Acuan Kegiatan berfungsi sebagai pijakan atau kerangka acuan dalam menyusun program/kegiatan.

12	Kesetaraan Gender	Kondisi yang sama dan adil antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan penikmatan atas hak-hak asasi sebagai manusia dan warganegara di semua bidang kehidupan.
13	Ketidak Adilan Gender	Pandangan, sikap, perilaku, dan proses yang tidak adil terhadap perempuan atau laki-laki.
14	Ketimpangan/ kesenjangan gender	Kondisi/situasi yang berbeda yang diterima oleh perempuan atau laki-laki dari proses pembangunan maupun kehidupan.
15	Kinerja	Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan mencapai dan kualitas yang terukur.
16	Manfaat	Kegunaan suatu keluaran (<i>outputs</i>) yang dirasakan langsung masyarakat. Contoh: tersedianya fasilitas umum
17	Outcome	Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (<i>output</i>) kegiatan pada jangka menengah. <i>Outcome</i> merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan/harapan masyarakat
18	Output	Segala sesuatu yang berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari kegiatan & program : fisik/non fisik
19	Pemantauan	Sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
20	Pengarusutamaan Gender (PUG)	Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional, termasuk penghapusan segala bentuk deskriminasi dan perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
21	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
22	Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) GBS	Pernyataan Anggaran Gender adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.
23	Responsif Gender	Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, dengan suatu pandangan yang ditujukan kepada keterbatasan-keterbatasan dari keadilan.

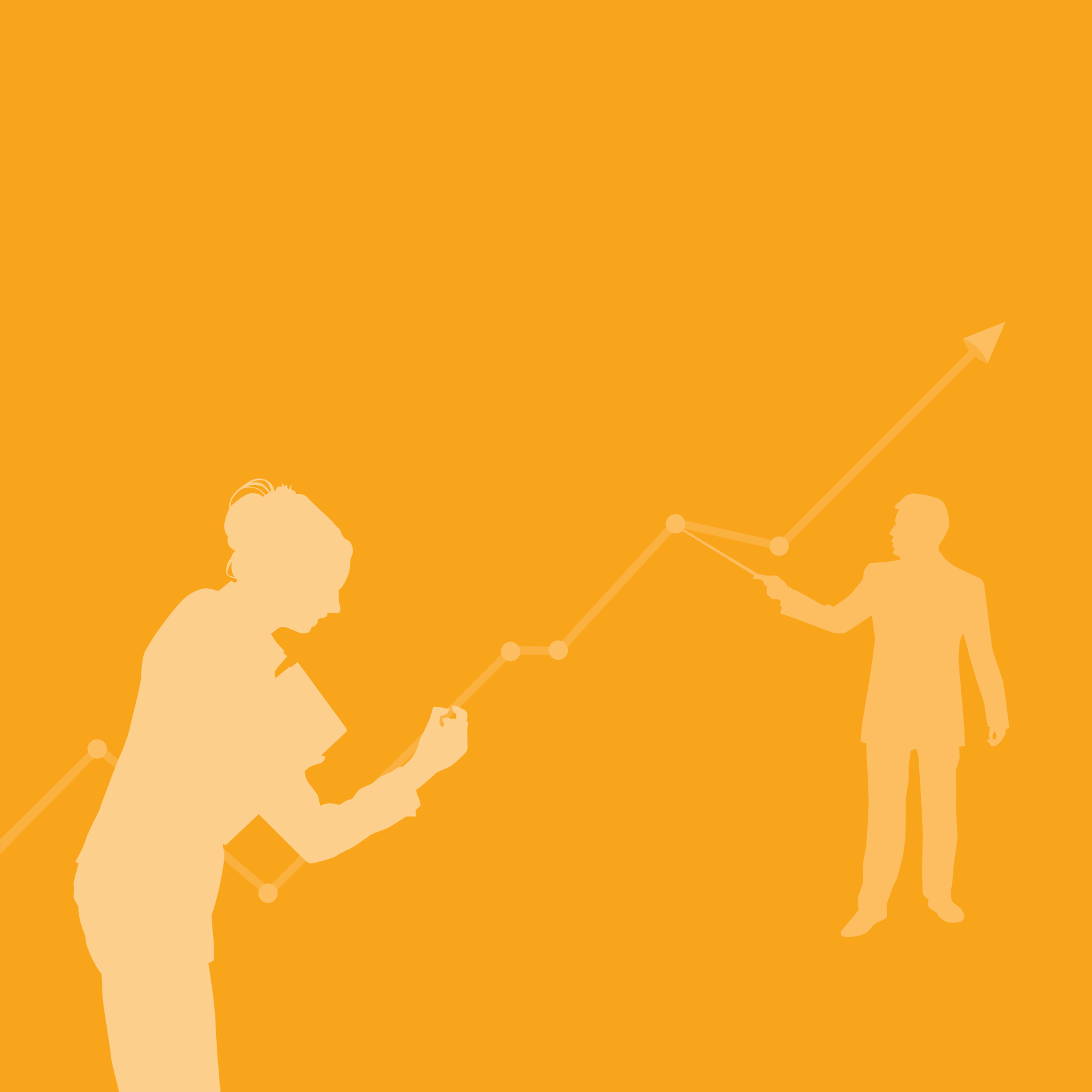
DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas & ADB. Kumpulan Bahan Latihan "Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan", jakarat : Bappenas
- Budlender, Debbie. 2008. *"Performance Budgeting and Indicators: How Do we Make Them Gender-Sensitive?"*. Handout pada *Advanced Gender Budget Training, International Budget Partnership-BIGS*.
- Endriana Noerdin Dkk. 2005. *"Modul Latihan Analisis Gender & Anggaran berkeadilan gender"*. Jakarta : Women Research Institute (WRI).
- Eva K. Soundari Dkk, 2006, *"Modul Latihan Advokasi Penganggaran berbasis Kinerja Responsif Gender"*, Pattiro & The Asia Foundation, Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2011. Modul Pelatihan Fasilitator untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):", Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, GIZ: Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2008. Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive Gender (PPRG),
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. UNFPA & BKKBN 2005. "Bunga rampai PUG: Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender", Jakarta:
- IASTP III, & Austraning Internationa. Th 2008. *"Key Performance Indicators for Measuring Gender Mainstreaming in Indonesia"*, Jakarta: Ministry of Women Empowerment (MOWE)
- Sharp, Ronda. 2003. *"Budgeting For Equity: Gender Budget Initiatives within a Framework of Performance Oriented Budgeting"*, Jakarta. UNIFEM
- Suryadi, Asep. 2007. Persyaratan dan Unsur-Unsur Evaluasi yang Baik. Materi presentasi dalam acara " Program Pengembangan Kapasitas Perencanaan Kebijakan, *Monitoring dan Evaluasi Program-Program yang Berpihak Kepada Kaum Miskin"*. Bogor.
- Unifem & UNFPA. 2006. *"Gender Responsive Budget in Practice: Training manual"*. Jakarta: Unifem
- World Bank. 2004. *Monitoring and Evaluation: some tool, methods, and Approaches*. Washington D.C.: The World Bank
- UNDP & MOWE.2007. *"Modul Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Indonesia"*. Jakarta: UNDP

LAMPIRAN 1.

FORMULIR ISIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PPRG





Lampiran 1

Formulir isian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG

Formulir P1

FORMULIR PEMANTAUAN TINGKAT K/L

TGL :
BULAN :
KEMENTERIAN :

	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
I	INDIKATOR INPUT*			
	Komitmen:			
1	Apakah ada peraturan menteri tentang pelaksanaan PUG? a. Jika ada, sebutkan nomornya (Permen, SK, SE atau sejenisnya) b. Jika tidak, jelaskan mengapa?			
2	Bila ada peraturan Menteri, apakah sudah disosialisasikan a. Bila sudah kepada siapa? b. Bila tidak mengapa?			
	Kebijakan:			
1	Apakah Renstra Lembaga Saudara ada yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?			
2	Apakah ada Renja Tahunan K/L yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?			

3	<p>Apakah ada pedoman PPRG di K/L?</p> <ol style="list-style-type: none"> Bila ada apakah sudah disosialisasikan? Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? Bila tidak mengapa? 			
4	<p>Apakah ada pedoman/petunjuk teknis PPRG di K/L?</p> <ol style="list-style-type: none"> Bila ada apakah sudah disosialisasikan? Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? Bila tidak mengapa? 			
5	<p>Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah?</p>			
Kelebagaan:				
1	<p>Apakah ada POKJA PUG di K/L yang di sahkan pimpinan?</p> <ol style="list-style-type: none"> Bila ada sebutkan No SK nya? Bila tidak mengapa? Bila ada apakah keanggotaan POKJA terdiri dari unsur-unsur Biro Perencanaan, Biro keuangan, Satker, dan Inspektorat? Apakah anggota POKJA melibatkan unsur masyarakat? Apakah ada pertemuan POKJA? Apakah ada rencana kerja POKJA? Apakah ada laporan POKJA secara rutin? Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang PUG? 			
2	<p>Apakah ada <i>Focal Point</i>?</p> <ol style="list-style-type: none"> Bila ada di <i>level</i>/komponen mana? Bila ada <i>focal point</i>, apakah sudah mendapat latihan PUG? Bila belum mengapa? 			

<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Sumber daya manusia:</p> <p>Apakah ada fasilitator internal K/L?</p> <p>Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG?</p> <p>a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG?</p> <p>b. Bila belum, mendapat pelatihan, mengapa?</p> <p>Apakah SDM Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?</p> <p>Sumber dana</p> <p>Apakah tersedia dana dalam melaksanakan PUG?</p> <p>Data terpilah:</p> <p>Apakah ada data terpilah tentang sektor yang ditangani K/L?</p> <p>Alat analisis gender:</p> <p>Apakah metoda analisis gender yang digunakan adalah metode GAP atau yang lain?</p> <p>Peran serta masyarakat :</p> <p>Apakah ada forum pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membahas PUG atau isu gender?</p> <p>Apakah ada keterlibatan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?</p>			
--	---	--	--	--

II	INDIKATOR PROSES*			
	<p>Renstra dan RKA KL</p>			
1	Apakah ada program dalam Renstra K/L yang mengandung isu gender?			
2	Apakah ada kegiatan dalam RKA K/L yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARGnya?			
1	<p>Output terpilih (prioritas):</p>			
2	Apakah ada <i>output/sub output</i> yang akan disusun ARGnya?			
2	Berapa jumlah output /sub output yang ditargetkan akan disusun ARGnya untuk tahun berjalan?			
1	<p>Tersedia data terpilih yang terkait <i>output</i>:</p>			
1	Apakah tersedia data terpilih yang memadai terkait dengan program dan <i>output</i> yang akan disusun ARGnya?			
1	<p>Proses analisis GAP atau sejenis:</p>			
1	Apakah dilakukan analisis gender terkait <i>output</i> yang dipilih?			
1	<p>Hasil analisis GAP</p>			
1	Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?			

<p>III</p>	<p align="center">INDIKATOR OUTPUT**</p> <p>GBS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Berapa output/sub output yang dibuat GBSnya? 2 Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender? 3 Berapa jumlah GBS yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi? <p>KAK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Apakah ada KAK untuk setiap kegiatan yang ada GBSnya? 2 Apakah penyusunan GBS dan KAK mengacu kepada format PMK 104/2010 atau PMK yang berlaku? 3 Apakah GBS dan KAK dilampirkan pada proses pengajuan DIPA K/L? 			
<p>IV</p>	<p align="center">INDIKATOR OUTCOMES**</p> <p>Satker yang menyusun PPRG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Berapa jumlah Satker di K/L? 2 Berapa jumlah Satker di K/L yang melakukan PPRG? <p>Hasil penelaahan (DJA/ KPP-PA):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Apakah ada tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA, KPP-PA tentang GBS dan TOR? 2 Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan? <p>Kegiatan dengan output/sub output yang ada GBS tercantum dalam DIPA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Apakah kegiatan untuk mencapai output/sub output sesuai GBS tercantum dalam DIPA?. 			

	<p>Anggaran untuk mencapai <i>output/ sub output</i> yang tersedia dalam RKAK/L sesuai dengan yang tersedia dalam DIPA:</p>			
1	Apakah anggaran yang tersedia dalam RKAK/L dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DIPA ?			
2	Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS dan KAK (dalam Rp 000.000)?.			
3	Berapa jumlah dana yang ada GBS dan KAK nya tercantum dalam DIPA seluruh Satker K/L (dalam Rp 000.000)?			
4	Berapa jumlah total dana dalam DIPA seluruh Satker yang menyusun ARG (dalam Rp 000.000)?			
5	Berapa jumlah total anggaran responsif gender (yang ada GBS) K/L (dalam Rp 000.000)?			
6	Berapa dana yang tersedia untuk seluruh K/L (dalam Rp 000.000)?			
	<p>Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya</p>			
1	Berapa jumlah total dana K/L yang sudah direalisasikan?			
2	Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DIPA seluruh K/L yang sudah direalisasikan (Rp 000)?			
3	Apakah kegiatan yang responsif gender (ada GBS dan KAK) dan tercantum dalam DIPA sudah direalisasikan?			
4	Bila belum direalisasikan mengapa?			
5	Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai?			
6	Bila belum tercapai, mengapa?			

*** CATATAN : BERI TANDA "V" PADA KOLOM YANG SESUAI, BILA JAWABAN BERBENTUK NARASI TULISKAN PADA KOLOM KETERANGAN**

**** DIISI DENGAN ANGKA ATAU PERNYATAAN SESUAI DENGAN FAKTA**

PELAKSANA PEMANTAUAN

FORMULIR EVALUASI TINGKAT K/L

TGL :
 BULAN :
 KEMENTERIAN :

NO	Aspek/ sasaran	Informasi yang dibutuhkan	Diisi, Angka, %, pernyataan	Metode
1	<u>Input</u> Sejauh mana SDM-K/L mengetahui dan memahami Prasyarat PUG	<ol style="list-style-type: none"> Berapa proporsi <i>input</i> untuk menyusun PPRG tersedia dibandingkan prasyarat PUG? Proporsi unit Eselon II yang sudah tersosialisasi dengan peraturan Menteri (bila ada) Proporsi SDM perencana atau unit terkait yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG Masalah dan kendala terkait aspek <i>input</i> yang dihadapi dapat diselesaikan (bila ada masalah/kendala) 		<ol style="list-style-type: none"> <i>Interview</i> dengan POKJA atau <i>Focal point</i> <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan dan perencana komponen (penyusun PPRG) Dinilai dari hasil pemantauan
2	<u>Proses</u> Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> Berapa proporsi program dalam Renstra yang ada isu gendernya dibanding dengan program K/L? Berapa proporsi <i>output/ sub output</i> yang ada isu gendernya dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada di RKAK/L? Berapa proporsi <i>output/ sub output</i> yang ada GBS dan TOR dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada isu gendernya? Seberapa lengkap data terpilah terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)? Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan 		<ol style="list-style-type: none"> Membandingkan RKA K/L dengan jumlah GBS <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan K/L dan perencana komponen Dinilai dari hasil pemantauan

3.	<p><u>Output</u> Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan PMK 104/2010 atau PMK yang berlaku dibanding dengan jumlah <i>output/sub output</i> yang ada isu gender (target penyusunan ARG)? 2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %) 3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dan TOR dengan analisis gender (dalam %) 4. Kesesuaian GBS dengan TOR (dalam %) 5. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek <i>output</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Interview</i> dengan perencana komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen , hasil analisis gender, GBS dan KAK
4.	<p><u>Outcome</u> Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di K/L</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi jumlah Satker yang menyusun ARG dibandingkan Satker yang ada di K/L? 2. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DIPA sesuai dengan GBS dan KAK yang diusulkan? 3. Berapa proporsi Jumlah dana <i>output/sub output</i> yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS dan KAK seluruh Satker? 4. Berapa proporsi Anggaran <i>output/sub output</i> yang ada GBS di seluruh K/L dibandingkan total anggaran K/L? 5. Persentasi kegiatan yang responsif gender dan ada di DIPA yang sudah dilaksanakan sesuai format GBS dan KAK 		<p>Membandingkan dokumen GBS dan KAK dengan DIPA dan POA</p>

	<p>6. Berapa persentasi anggaran yang ada GBSnya sudah direalisasikan?</p> <p>7. Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender</p> <p>8. Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender</p> <p>9. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan yang tercantum dalam GBS</p>		
--	--	--	--

Pelaksana evaluasi

FORMULIR PEMANTAUAN TINGKAT Eselon I

TGL :
 BULAN :
 KEMENTERIAN :
 UNIT Eselon I :

NO	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
1	Komitmen:			
1	Apakah ada peraturan menteri tentang pelaksanaan PUG? a. Jika ya, sebutkan nomornya (Permen, SK, SE atau sejenisnya) b. Jika tidak, jelaskan mengapa?			
2	Bila ada peraturan Menteri, apakah sudah disosialisasikan di tingkat Eselon I a. Bila sudah kepada siapa ?			
1	Kebijakan:			
1	Apakah Renstra terkait tupoksi Eselon I ada yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana ? b. Bila tidak mengapa?			
2	Apakah ada Renja Tahunan Eselon I yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?			
3	Apakah ada pedoman PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan di tingkat Eselon I? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa?			

4	<p>Apakah ada petunjuk teknis PPRG di K/L?</p> <p>a. Bila ada, apakah sudah disoialisasikan di tingkat Eselon I?</p> <p>b. Bila sudah disoialisasikan, kepada siapa?</p> <p>c. Bila tidak mengapa?</p>			
5	<p>Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah dari pimpinan Eselon I?</p>			
Kelembagaan:				
1	<p>Apakah ada POKJA PUG di K/L yang disahkan pimpinan?.</p> <p>a. Bila ada sebutkan No SK nya</p> <p>b. Bila tidak mengapa?</p> <p>c. Bila ada apakah ada unsur dari Eselon I yang menjadi anggota POKJA</p> <p>d. Apakah ada pertemuan POKJA?</p> <p>e. Apakah ada rencana kerja POKJA?</p> <p>f. Apakah ada laporan POKJA secara rutin?</p> <p>g. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang PUG?</p>			
2	<p>Apakah ada yang menjadi <i>Focal Point</i> di tingkat Eselon I?</p> <p>d. Bila ada di <i>level</i>/komponen mana?</p> <p>e. Bila ada <i>focal point</i>, apakah sudah mendapat latihan PUG?</p> <p>f. Bila belum mengapa?</p>			

<p>1 Apakah ada fasilitator internal Eselon I?</p> <p>2 Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG di tingkat Eselon I?</p> <p>a. Bila ada apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG?</p> <p>b. Bila belum mendapat pelatihan, mengapa?</p> <p>3 Apakah SDM Satker di tingkat Eselon I memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?</p>	<p>Sumber daya manusia:</p> <p>Sumber dana</p> <p>1 Apakah tersedia dana dalam melaksanakan PUG?</p> <p>Data terpilah:</p> <p>1 Apakah ada data terpilah tentang program yang ditangani Eselon I?</p> <p>Alat analisis gender:</p> <p>1 Apakah metoda analisis gender yang digunakan adalah metode GAP atau yang lain?</p> <p>Peran serta masyarakat :</p> <p>1 Apakah ada forum pertemuan dengan LSM dalam membahas PUG atau isu gender?</p> <p>2 Apakah ada keterlibatan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?</p>			
<p>II</p>	<p>INDIKATOR PROSES*</p> <p>Renstra dan RKA Eselon I</p> <p>1 Apakah ada program dalam Renstra terkait tupoksi Eselon I yang mengandung isu gender?</p> <p>2 Apakah ada kegiatan dalam RKA K/L tingkat Eselon I yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARGnya?</p>			

<p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Output terpilih (prioritas):</p> <p>Apakah ada <i>output/sub output</i> yang akan disusun ARGnya?</p> <p>Berapa jumlah <i>output /sub output</i> yang ditargetkan akan disusun ARGnya untuk tahun berjalan di seluruh Eselon I?</p> <p>Tersedia data terpilih yang terkait output:</p> <p>Apakah tersedia data terpilih yang memadai terkait dengan program dan <i>output</i> yang akan disusun ARGnya?</p> <p>Proses analisis GAP atau sejenis:</p> <p>Apakah dilakukan analisis gender terkait <i>output</i> yang dipilih?</p> <p>Hasil analisis GAP</p> <p>Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?</p>			
<p>III</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>INDIKATOR OUTPUT**</p> <p>GBS:</p> <p>Berapa <i>output/sub output</i> yang di buat GBSnya di level Eselon I?</p> <p>Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender?</p> <p>Berapa jumlah GBS di level Eselon I yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi?</p> <p>KAK:</p> <p>Apakah ada KAK untuk setiap kegiatan yang ada GBS?</p> <p>Apakah penyusunan GBS dan KAK mengacu kepada format PMK 104/2010 atau PMK yang berlaku?</p> <p>Apakah GBS dan KAK dilampirkan pada proses pengajuan DIPA K/L?</p>			

IV	<p style="text-align: center;">INDIKATOR <i>OUTCOMES</i>**</p> <p>Satker yang menyusun PPRG</p> <p>1 Berapa jumlah Satker di level Eselon I?</p> <p>2 Berapa jumlah Satker di level Eselon I yang melakukan PPRG?</p> <p>Hasil penelaahan (DJA/KPP&PA):</p> <p>1 Apakah ada tanggapan dari Tim Penelaah anggaran tentang GBS dan TOR?</p> <p>2 Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan?</p> <p>Kegiatan dengan <i>output/sub output</i> yang ada GBS tercantum dalam DIPA.</p> <p>1 Apakah kegiatan untuk mencapai <i>output/sub output</i> yang dimuat GBS tercantum dalam DIPA?</p> <p>Anggaran untuk mencapai <i>output/sub output</i> yang tersedia dalam RKAKL sesuai dengan yang tersedia dalam DIPA:</p> <p>1 Apakah anggaran yang tersedia dalam RKAKL ... telah dibuat GBS nya tercantum dalam DIPA?</p> <p>2 Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS dan KAK di seluruh Eselon I (dalam Rp 000.000)?</p> <p>3 Berapa jumlah dana yang ada GBS dan KAK nya tercantum dalam DIPA seluruh Satker Eselon I (dalam Rp 000.000)?</p> <p>4 Berapa jumlah total dana dalam DIPA seluruh Satker Eselon I yang menyusun ARG (dalam Rp 000.000)?</p> <p>5 Berapa jumlah total anggaran responsif gender (yang ada GBS) di level Eselon I (dalam Rp 000.000)?</p> <p>6 Berapa dana yang tersedia dalam DIPA untuk seluruh Eselon I (dalam Rp 000.000)?</p>			
----	---	--	--	--

	Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya			
1	Berapa jumlah total dana Eselon I yang sudah direalisasikan?			
2	Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DIPA di level Eselon I sudah direalisasikan?			
3	Apakah kegiatan yang responsif gender (ada GBS dan KAK) dan tercantum dalam DIPA Eselon I sudah direalisasikan?			
4	Bila belum direalisasikan mengapa?			
5	Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai?			
6	Bila belum tercapai, mengapa?			

***CATATAN : BERI TANDA "V" PADA KOLOM YANG SESUAI. BILA JAWABAN BERBENTUK NARASI TULISKAN PADA KOLOM KETERANGAN**

****DIISI DENGAN ANGKA ATAU PERNYATAAN SESUAI DENGAN FAKTA**

PELAKSANA PEMANTAUAN

FORMULIR EVALUASI TINGKAT Eselon I

TGL :
 BULAN :
 KEMENTERIAN :
 UNIT Eselon I :

NO	Aspek/ sasaran	Informasi yang dibutuhkan	Diisi, Angka, %, pernyataan	Metode
1	<u>Input</u> Sejauh mana SDM K/L mengetahui dan memahami Prasyarat PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi unit Eselon II yang sudah tersosialisasi dengan peraturan Menteri (bila ada) 2. Proporsi SDM perencana atau unit terkait yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG 3. Masalah dan kendala terkait aspek input yang dihadapi dapat diselesaikan (bila ada masalah/kendala) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Interview</i> dengan POKJA atau <i>Focal point</i> 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan dan Perencana komponen (penyusun PPRG) 3. Dinilai dari hasil pemantauan
2	<u>Proses</u> Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi <i>output/ sub output</i> yang ada isu gendernya dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada di RKA Eselon I? 2. Berapa proporsi <i>output/ sub output</i> yang ada GBS dan TOR dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada isu gendernya? 3. Seberapa lengkap data terpilah terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)? 4. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membandingkan RKA K/L dengan jumlah GBS 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan K/L dan Perencana komponen 3. Dinilai dari hasil pemantauan

3.	<p><u>Output</u> Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan PMK 104/2010 atau PMK yang berlaku dibanding dengan jumlah <i>output/sub output</i> yang terdapat isu gendernya (target penyusunan ARG di level Eselon I) 2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %) 3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dan TOR dengan analisis gender (dalam %) 4. Kesesuaian GBS dengan TOR (dalam %) 5. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek <i>output</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Interview</i> dengan perencana komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen, hasil analisis gender, GBS dan KAK
4	<p><u>Outcome</u> Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di K/L</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi jumlah Satker yang menyusun ARG dibandingkan Satker yang ada di level Eselon I? 2. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DIPA sesuai dengan GBS dan KAK yang diusulkan? 3. Berapa proporsi Jumlah dana <i>output/sub output</i> yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS dan KAK seluruh Satker? 4. Berapa proporsi Anggaran <i>output/sub output</i> yang ada GBS di seluruh Eselon I dibandingkan total anggaran Eselon I? 5. Persentasi kegiatan yang responsif gender dan ada di DIPA yang sudah dilaksanakan sesuai format GBS dan KAK 		<p>Membandingkan dokumen GBS dan KAK dengan DIPA dan POA (<i>Plan of Action</i>)</p>

	<p>6. Persentasi anggaran yang ada GBSnya sudah direalisasikan</p> <p>7. Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender</p> <p>8. Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender</p> <p>9. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan yang tercantum dalam GBS</p>		
--	--	--	--

Pelaksana evaluasi

FORMULIR PEMANTAUAN TINGKAT Eselon II (Satker)

TGL :
 BULAN :
 KEMENTERIAN :
 UNIT Eselon II :
 UNIT Eselon II (Satker) :

NO	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
I	INDIKATOR INPUT*			
	Komitmen:			
1	Apakah ada peraturan menteri tentang pelaksanaan PUG? a. Jika ya, sebutkan nomornya (Permen, SK, SE atau sejenisnya)			
2	Bila ada peraturan Menteri, apakah sudah disosialisasikan di tingkat Eselon II a. Bila sudah kepada siapa ?			
	Kebijakan:			
1	Apakah Renstra Lembaga Saudara ada yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana ? b. Bila tidak mengapa?			
2	Apakah ada Renja Tahunan Satker yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?			
3	Apakah ada pedoman PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan di tingkat Eselon II? b. Bila tidak mengapa?			

4	<p>Apakah ada petunjuk teknis PPRG di K/L?</p> <p>a. Bila ada apakah sudah disoialisasikan di tingkat Eselon II?</p> <p>b. Bila tidak mengapa?</p> <p>Kelembagaan:</p>			
1	<p>Apakah ada POKJA PUG di K/L yang disahkan pimpinan?</p> <p>a. Bila ada sebutkan No SK nya?</p> <p>b. Bila tidak mengapa?</p> <p>c. Bila ada apakah ada unsur dari Eselon II?</p> <p>d. Apakah ada pertemuan POKJA?</p> <p>e. Apakah ada rencana kerja POKJA?</p> <p>f. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang PUG?</p>			
2	<p>Apakah ada <i>Focal Point</i>?</p> <p>a. Apakah ada unsur <i>focal point</i> di Eselon II?</p> <p>Sumber daya manusia:</p>			
1	<p>Apakah ada fasilitator di Eselon II?</p> <p>Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PPRG di Eselon II?</p> <p>a. Bila ada apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG?</p> <p>b. Bila belum mendapat pelatihan, mengapa?</p>			
2	<p>Apakah SDM Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?</p> <p>Sumber dana</p>			
1	<p>Apakah ada tersedia dana dalam pelaksanaan PUG di Eselon II?</p> <p>Data terpilah:</p>			
1	<p>Apakah ada data terpilah tentang kegiatan yang ditangani Eselon II?</p>			

1	<p>Alat analisis gender:</p> <p>Apakah metoda analisis gender yang digunakan adalah metode GAP atau yang lain?</p> <p>Peran serta masyarakat :</p> <p>Apakah ada keterlibatan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?</p>			
II	<p style="text-align: center;">INDIKATOR PROSES*</p> <p>Renstra dan RKA K/L</p> <p>1 Apakah ada program dalam Renstra K/L yang mengandung isu gender?</p> <p>2 Apakah ada kegiatan dalam RKA K/L yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARGnya?</p> <p>Output terpilih (prioritas):</p> <p>1 Apakah ada <i>output/sub output</i> yang akan disusun ARGnya?</p> <p>2 Berapa jumlah <i>output /sub output</i> yang ditargetkan akan disusun ARGnya untuk tahun berjalan?</p> <p>Tersedia data terpilih yang terkait output:</p> <p>1 Apakah tersedia data terpilih yang memadai terkait dengan <i>output</i> yang akan disusun ARGnya?</p>			

<p>III</p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR <i>OUTPUT</i>**</p> <p>GBS:</p> <p>1. Berapa <i>output/sub output</i> yang di buat GBSnya di level Satker?</p> <p>2. Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender?</p> <p>3. Berapa jumlah GBS yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi?</p> <p>KAK:</p> <p>1. Apakah ada KAK untuk setiap kegiatan yang ada GBS?</p> <p>2. Apakah penyusunan GBS dan KAK mengacu kepada format PMK 104/2010 atau PMK yang berlaku?</p> <p>3. Apakah GBS dan KAK dilampirkan pada proses pengajuan DIPA?</p>			
<p>IV</p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR <i>OUTCOMES</i>**</p> <p>Satker yang menyusun PPRG</p> <p>1. Apakah Satker saudara menyusun ARG? 1. Bila tidak mengapa?</p> <p>Hasil penelaahan (DJA/KPP-PA):</p> <p>1. Bila Satker menyusun ARG, apakah ada tanggapan dari Tim Penelaah Anggaran DJA/KPP-PA tentang GBS dan TOR?</p> <p>2. Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan?</p> <p>Kegiatan dengan <i>output/sub output</i> yang ada GBS tercantum dalam DIPA.</p> <p>1. Apakah kegiatan untuk mencapai <i>output/sub output</i> sesuai GBS tercantum dalam DIPA?</p>			

	<p>Anggaran untuk mencapai <i>output/ suboutput</i> yang tersedia dalam RKAKL sesuai dengan yang tersedia dalam DIPA:</p>			
1	Apakah anggaran yang tersedia dalam RKA-K/L dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DIPA Satker?			
2	Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS dan KAK (dalam Rp 000.000)?			
3	Berapa jumlah dana yang ada GBS dan KAK nya tercantum dalam DIPA Satker (dalam Rp 000.000)?			
4	Berapa jumlah total dana dalam DIPA Satker yang menyusun ARG (dalam Rp 000.000)?			
5	Berapa jumlah total anggaran responsif gender (yang ada GBS) tingkat Satker (dalam Rp 000.000)?			
6	Berapa dana yang tersedia untuk tingkat Satker (dalam Rp 000.000)?			
	<p>Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya</p> <p>Berapa jumlah total dana Satker yang sudah di realisasikan?</p>			
1	Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DIPA sudah direalisasikan (Rp 000.000)?			
2	Apakah kegiatan yang responsif gender (ada GBS dan KAK) dan tercantum dalam DIPA sudah direalisasikan?			
3	Bila belum direalisasikan mengapa?			
4	Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai?			
5	Bila belum tercapai, mengapa?			

***CATATAN: BERI TANDA "V" PADA KOLOM YANG SESUAI, BILA JAWABAN BERBENTUK NARASI TULISKAN PADA KOLOM KETERANGAN**

****DIISI DENGAN ANGKA ATAU PERNYATAAN SESUAI DENGAN FAKTA**

PELAKSANA PEMANTAUAN

FORMULIR EVALUASI TINGKAT Eselon II (Satker)

TGL :
 BULAN :
 KEMENTERIAN :
 UNIT Eselon I :
 UNIT Eselon II :

NO	Aspek/ sasaran	Informasi yang di butuhkan	Diisi, Angka, %, pernyataan	Metode
1	<u>Input</u> Sejauh mana SDM K/L mengetahui dan memahami Prasyarat PUG	1. Proporsi SDM perencana di Eselon II yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG		1. <i>Interview</i> dengan POKJA atau <i>Focal point</i> 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan dan perencana komponen (penyusun PPRG) 3. Dinilai dari hasil pemantauan
2	<u>Proses</u> Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	1. Berapa proporsi <i>output/ suboutput</i> yang ada isu gendernya dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada di RKAKL Satker? 2. Berapa proporsi <i>output/ suboutput</i> yang ada GBS dan TOR dibandingkan dengan output yang ada isu gendernya? 3. Seberapa lengkap data terpilah terkait kegiatan yang disusun ARG nya (dalam %)? 4. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan		1. Membandingkan RKA K/L dengan jumlah GBS 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan K/L dan perencana komponen 3. Dinilai dari hasil pemantauan

3.	<p><u>Output</u> Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan PMK 104/2010 atau PMK yang berlaku dibanding dengan jumlah <i>output/sub output</i> yang ada isu gender (target penyusunan ARG)? 2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %) 3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dan TOR dengan analisis gender (dalam %) 4. Kesesuaian GBS dengan TOR (dalam %) 5. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek <i>output</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Interview</i> dengan perencana komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen , hasil analisis gender, GBS dan KAK
4.	<p><u>Outcomes</u> Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di K/L</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DIPA sesuai dengan GBS dan KAK yang diusulkan? 2. Berapa proporsi Jumlah dana <i>output/sub output</i> yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS dan KAK? 3. Berapa proporsi Anggaran <i>output/sub output</i> yang ada GBS dibandingkan total anggaran Satker? 4. Persentasi kegiatan yang responsif gender dan ada di DIPA yang sudah dilaksanakan sesuai format GBS dan KAK? 		<p>Membandingkan dokumen GBS dan KAK dengan DIPA dan POA (Plan of Action)</p>

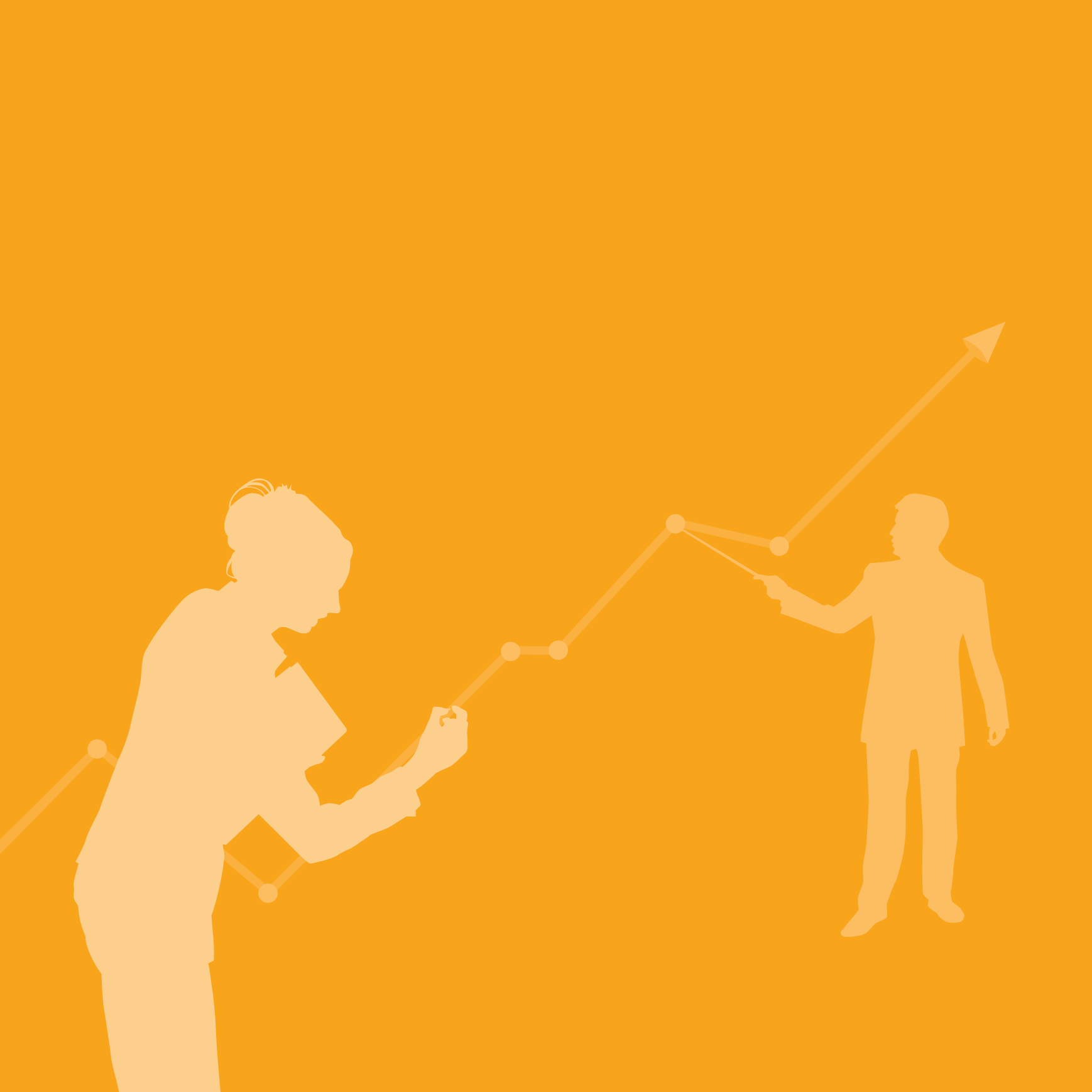
	<ol style="list-style-type: none">5. Apakah persentasi anggaran yang ada GBSnya sudah direalisasikan?6. Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender7. Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender8. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan yang tercantum dalam GBS		
--	--	--	--

Pelaksana evaluasi

LAMPIRAN 2.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR





PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

Petunjuk umum:

1. Pengisian formulir dilakukan secara berjenjang mulai dari unit Eselon II (Satker), unit Eselon I dan Pimpinan Kementerian dan Lembaga.
2. Data dan informasi pada formulir untuk K/L merupakan kompilasi dari data dan informasi pada formulir Eselon I, kecuali data dan informasi tentang *input*.
3. Data dan informasi pada formulir untuk Eselon I merupakan kompilasi dari data dan informasi pada formulir Eselon II (Satker) kecuali data dan informasi tentang *input*.
4. Formulir P1 digunakan untuk pemantauan tingkat K/L, formulir P2 untuk unit Eselon I atau *level* program, dan formulir P3 untuk unit Eselon II (Satker) atau *level* kegiatan/*output*.
5. Formulir E1 digunakan untuk evaluasi tingkat K/L, formulir E2 untuk unit Eselon I atau *level* program dan formulir E3 untuk unit Eselon II (Satker) atau *level* kegiatan/*output*.
6. Jawaban yang membutuhkan narasi dituliskan pada kolom keterangan pada sisi sesuai no pertanyaan.

Petunjuk teknis:

A. Formulir Pemantauan

- I. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator *input* cukup jelas.
- II. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator proses.

Renstra dan RKA K/L.

1. Program yang mengandung isu gender dapat dilihat pada *level* program dan atau kegiatan apakah ada isu gender, yaitu terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal Akses, Peran, Kontrol dan Manfaat terkait dengan program dan atau kegiatan tersebut.
2. Kegiatan yang mengandung isu gender yang sudah disepakati untuk disusun ARGnya. Dilihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam RKAK/L yang diprioritaskan dan telah ditetapkan oleh masing-masing K/L untuk disusun ARG nya.

Output terpilih (prioritas)

1. *Output* atau *sub output* yang akan disusun ARGnya mengacu kepada pertanyaan no 2 tentang Renstra di atas. *Output* atau *sub output* bahkan bisa komponen dari kegiatan, sangat tergantung dari struktur anggaran, dan besarnya kegiatan di setiap K/L.
2. Pertanyaan no 2 cukup jelas.

Pertanyaan tentang data terpilah, proses analisis GAP dan hasil analisis GAP: cukup jelas.

III. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator *output*.

GBS.

1. Jumlah *output/sub output*/komponen yang dibuat GBSnya mengacu kepada pertanyaan no 1 tentang *output* terpilih.
2. Pertanyaan no 2 dan 3 cukup jelas.

KAK: pertanyaan tentang KAK cukup jelas.

IV. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator *outcome*

Pertanyaan tentang Satker yang menyusun PPRG: cukup jelas

Hasil penelaahan :

1. Pertanyaan no 1: Setiap usulan kegiatan yang disusun ARGnya ditelaah oleh Tim Penelaah, apakah di DJA atau oleh Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti yang dijelaskan pada PMK no 93 tahun 2011. Tim Penelaah akan memberikan umpan balik (tanggapan) kepada K/L tentang usulan kegiatan yang disusun ARGnya.
2. Pertanyaan no 2: cukup jelas.

Kegiatan dengan *output/sub output* atau komponen yang ada GBS tercantum dalam DIPA.

1. Pertanyaan no 1 dapat dijawab dengan melihat DIPA tahun berjalan. Apakah kegiatan dan anggaran dalam GBS yang disusun tahun sebelumnya tercantum dalam DIPA tahun berjalan. Bisa sesuai 100% seperti yang diusulkan, dan bisa lebih kecil, atau bahkan tidak ada dalam DIPA.

Anggaran untuk mencapai *output/sub output* atau komponen yang tersedia dalam RKAK/L sesuai atau sama dengan yang tercantum dalam DIPA.

1. Pertanyaan no 1 dilihat dari pagu anggaran untuk kegiatan yang disusun ARGnya dalam RKAK/L dan anggaran dari kegiatan yang sama dalam DIPA, apakah ada atau tidak.
2. Pertanyaan no 2 cukup jelas
3. Pertanyaan no 3: dilihat dari jumlah dana untuk kegiatan yang responsif gender (yang disusun GBS dan KAK) tahun sebelumnya tercantum dalam DIPA tahun berjalan.
4. Pertanyaan no 4: diisi dengan jumlah total dana seluruh Satker yang menyusun ARG. Misalnya K/L A memiliki 5 Satker (a, b, c, d dan e) tetapi hanya 3 Satker (a, b, dan e) yang menyusun ARG pada tahun itu. Maka jumlah total dana dari Satker yang menyusun ARG adalah jumlah total dana DIPA dari Satker a, b dan e saja.
5. Pertanyaan no 5: diisi dengan jumlah total dana yang responsif gender dari Satker-Satker yang menyusun ARG seluruh K/L atau hanya dana yang ada GBSnya,
6. Pertanyaan no 6 diisi dengan total dana DIPA seluruh K/L.

Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBSnya

1. Pertanyaan no 1: cukup jelas.
2. Pertanyaan no 2 diisi dengan jumlah dana pada pertanyaan no 5 di atas yang sudah direalisasikan pada waktu dilakukan pemantauan.
3. Pertanyaan no 3 diisi dengan realisasi kegiatan yang responsif gender yaitu kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam GBS.
4. Pertanyaan no 4; cukup jelas.
5. Pertanyaan no 5 ini diisi dengan melihat capaian indikator *output* dan *outcome* dari kegiatan pada saat dilakukan pemantauan dibandingkan dengan target indikator *output* dan *outcome* yang tertulis di GBS .
6. Pertanyaan no 6: cukup jelas.

B. Formulir Evaluasi

Petunjuk Umum

1. Sumber data dan informasi untuk evaluasi adalah hasil pemantauan yang tergambar dari data dan informasi yang tertulis dalam formulir pemantauan setiap tingkatan.
2. Formulir pemantauan harus diisi dengan lengkap, karena merupakan sumber data dan informasi untuk evaluasi.

Petunjuk teknis

I. Formulir yang berkaitan dengan Input

1. Pertanyaan no 1: diisi dengan menghitung proporsi dari 7 prasyarat PUG yang sudah ada pada K/L. Misalnya K/L A baru memiliki 3 dari 7 prasyarat PUG, berarti proporsi *input* untuk menyusun PPRG pada K/L tersebut adalah 3/7 atau 42.8%.
2. Pertanyaan no 2: apabila Peraturan Menteri atau Pimpinan K/L tentang PUG atau PPRG ada, maka proporsi Eselon II yang sudah tersosialisasi tentang Peraturan Menteri tersebut dapat diisi. Apabila tidak ada Peraturan Menteri, pertanyaan ini dijawab dengan: tidak ada atau belum ada Peraturan Menteri/Pimpinan K/L yang berkaitan dengan PUG atau PPRG.
3. Pertanyaan no 3: sama dengan pertanyaan no 2.
4. Pertanyaan no 4: dilihat dari jumlah perencana yang sudah mengikuti sosialisasi/*workshop* atau pelatihan tentang PPRG dibandingkan dengan jumlah semua perencana komponen/unit yang ada pada K/L.
5. Pertanyaan no 5. Dilihat dari jumlah kendala/masalah berkaitan dengan aspek input yang dapat diselesaikan saat pemantauan dan evaluasi dilakukan dibandingkan dengan jumlah kendala/masalah yang dihadapi.

II. Formulir yang berkaitan dengan proses

1. Pertanyaan 1, 2, 3 dan 4 dapat diisi bila formulir pemantauan terkait aspek proses terisi secara lengkap.
2. Pertanyaan no 5 dilihat dari jumlah kendala/masalah berkaitan dengan aspek proses yang dapat diselesaikan pada saat pemantauan dan evaluasi dilakukan dibandingkan dengan jumlah kendala/masalah yang dihadapi.

III. Formulir yang berkaitan dengan output

1. Pertanyaan no 1 dihitung dari data dan informasi yang diisi pada formulir pemantauan tentang aspek *output*.
2. Pertanyaan no 2,3 dan 4 dilihat dari penelaahan dokumen-dokumen untuk menyusun ARG seperti hasil analisis gender, GBS dan KAK (TOR).
3. Pertanyaan no 5: sama dengan pertanyaan no 5 pada aspek proses.

IV. Formulir yang berkaitan dengan outcomes

1. Pertanyaan pada formulir evaluasi dapat diisi bila formulir pemantauan terisi dengan lengkap.

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Merdeka Barat No.15, Jakarta 10110

Telepon : (021) 3842638, 3805563 Faksimile : (021) 3805562, 3805559

Website : www.menegpp.go.id